

## KONFLIK PERIKANAN TANGKAP DI PERAIRAN KABUPATEN BENGKALIS PROVINSI RIAU

### Fishing Conflict in The Waters of Bengkalis Regency Riau Province

Oleh:

T. Ersti Yulika Sari<sup>1\*</sup>, Sugeng H. Wisudo<sup>2</sup>, Daniel R. Monintja<sup>2</sup>, dan Tommy Purwaka<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Jurusan Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan, FPIK, UNRI, Jl. HR Subrantas km 12,5 Pekanbaru, Riau 28293

<sup>2</sup>Departemen Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan, FPIK, IPB, Jl. Lingkar Kampus, Darmaga – Bogor 16680

<sup>3</sup> Universitas Kristen Indonesia, Jl. Mayjen Sutoyo 2, Cawang, Jakarta 13630

\* Korespondensi: nonnysaleh@hotmail.com

Diterima: 14 Januari 2010; Disetujui: 10 Maret 2010

#### ABSTRACT

*The purpose of this study is to analyze the conflict in Bengkalis waters and contributing factors. Analysis of the conflict is descriptive and the factors that cause conflict with the approach of analyzed Fisher et al. (2000). The study was conducted in the waters Bengkalis Regency. The results showed that the conflict in Bengkalis waters began in 1983 to the present. This conflict started when hunting for kurau (*Eleutheronema tetradactylum*) in the waters of District Bantan began to rise. Primary factors driving the conflict has not received much attention and as basis for conflict resolution that remains in progress. These factors are identified into three parts: 1) cultural background, 2) social factors, and 3) juridical factor.*

**Key words:** Bengkalis Regency, conflict, kurau (*Eleutheronema tetradactylum*)

#### ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis konflik yang terjadi di perairan Bengkalis dan faktor-faktor penyebabnya. Konflik dianalisis secara deskriptif, sedangkan faktor-faktor penyebab konflik dianalisis dengan pendekatan Fisher *et al.* (2000). Penelitian dilakukan di perairan Kabupaten Bengkalis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik terjadi pada tahun 1983 hingga saat ini. Hal ini dimulai pada saat perburuan terhadap ikan kurau (*Eleutheronema tetradactylum*) mulai meningkat di perairan ini. Faktor mendasar pendorong terjadinya konflik belum banyak mendapat perhatian dan belum dijadikan dasar dalam penyelesaiannya sehingga konflik tetap berlangsung. Faktor tersebut diidentifikasi menjadi tiga bagian: 1) dilatarbelakangi kultur nelayan rawai Kecamatan, 2) faktor sosial dan 3) faktor yuridis.

**Kata kunci:** Kabupaten Bengkalis, konflik, kurau (*Eleutheronema tetradactylum*)

#### PENDAHULUAN

Konflik yang terjadi antara nelayan rawai, nelayan jaring batu dan nelayan trawl yang beroperasi di Perairan Provinsi Riau merupakan peristiwa yang sering terjadi di wilayah Pantai Timur Sumatera. Konflik dengan nelayan rawai disebabkan pengusaha perikanan jaring batu dan trawl menangkap ikan pada jalur penangkapan nelayan rawai, yaitu diba-

wah 3 mil laut dari garis pantai. Nelayan rawai mengalami penurunan hasil tangkapan, sebagai akibat ketidakmampuan untuk bersaing dengan nelayan jaring batu (*bottom drift gillnet*) ataupun nelayan trawl. Kondisi ini menyebabkan nelayan rawai mengadakan perlawanan dengan melakukan pembakaran dan penyanderaan terhadap beberapa kapal jaring batu dan trawl. Konflik pemanfaatan sumber daya perikanan di kawasan ini telah muncul sejak tahun

1980-an yang pada umumnya disebabkan oleh adanya introduksi teknologi dengan dalih modernisasi. Modernisasi pada berbagai sektor telah banyak menciptakan masalah, ketimpangan dan ketidakadilan dalam pemanfaatan sumber daya alam.

Modernisasi yang terjadi pada perikanan tangkap telah memperbesar intensitas upaya eksploitasi terhadap sumber daya perikanan di Perairan Kecamatan Bantan yang mengakibatkan terganggunya sistem sosial masyarakat setempat. Hal ini berakibat terancamnya mata pencaharian dan sistem nilai yang berlaku di tengah masyarakat. Keadaan ini memperpanjang daftar kasus konflik antara nelayan rawai Kecamatan Bantan dengan nelayan jaring batu yang dikuasai oleh para pemodal yang dirasakan semakin berkembang secara tajam. Hingga saat ini belum tampak adanya indikasi akan berakhirnya konflik dan dilakukannya upaya damai dari kedua belah pihak. Upaya penyelesaian konflik telah banyak dilakukan, tetapi sampai sejauh ini hasilnya masih kurang memuaskan bagi pihak yang berkonflik. Salah satunya disebabkan oleh belum dikenalnya tipologi konflik yang terjadi.

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis konflik yang terjadi di perairan Bengkalis dan mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya konflik.

## METODE PENELITIAN

### Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner terstruktur yang ditujukan untuk mengetahui jenis konflik dan faktor-faktor penyebab konflik. Data pendukung diperoleh melalui Kantor Kepala Desa, Kantor Camat Kecamatan Bantan, Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Bengkalis, Kantor Bagian Proyek Pembangunan Masyarakat Pantai dan Pengelolaan Sumber daya Perikanan (*Co-Fish Project*) Bengkalis dan Dinas Perikanan Provinsi Riau. Kajian terhadap berbagai dokumen atau kepustakaan yang relevan dilakukan untuk melengkapi dan mendukung hasil penelitian.

### Analisis Data

Analisis konflik yang terjadi dilakukan secara deskriptif dan faktor-faktor penyebab konflik dianalisis dengan pendekatan Fisher et al. (2000). Tahapan analisis adalah:

- 1) Pentahapan konflik, bertujuan untuk melihat tahap-tahap dan siklus peningkatan dan penurunan konflik, serta membahas pada tahap mana situasi konflik saat ini.
- 2) Urutan kejadian, yang bertujuan untuk mengi-

dentifikasi kejadian-kejadian yang paling penting untuk masing-masing pihak.

- 3) Pemetaan konflik, bertujuan untuk melihat hubungan antara berbagai pihak secara lebih jelas.
- 4) Analogi bawang bombay, bertujuan untuk menganalisis perbedaan pandangan tentang konflik dari pihak-pihak yang berkonflik.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pentahapan dan Urutan Kejadian Konflik

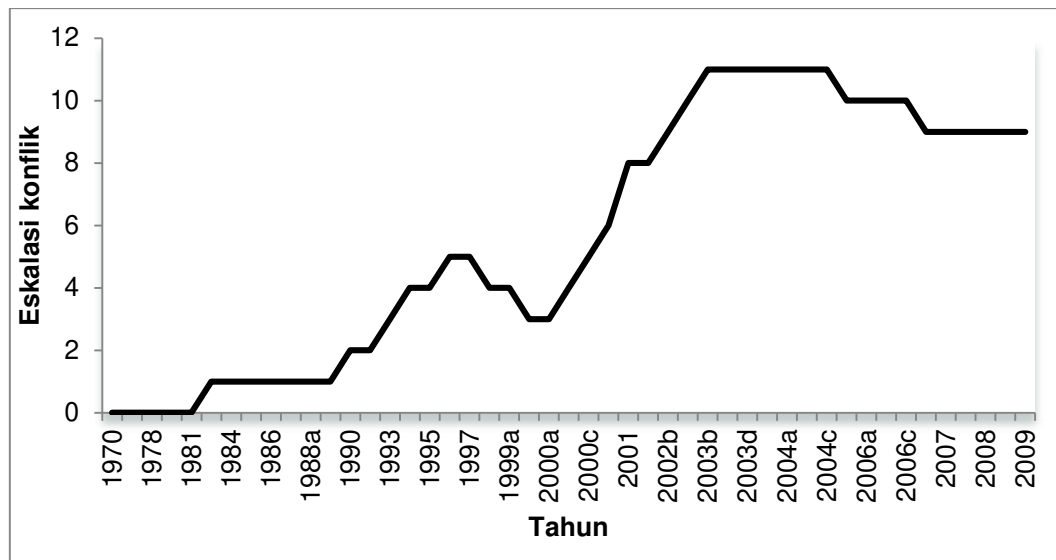
#### Pentahapan konflik

Konflik antara nelayan rawai dengan nelayan jaring kurau memiliki kedinamisan yang tinggi. Konflik berkembang sesuai dengan intensitas dan skala serta lamanya periode konflik. Data lapangan menunjukkan bahwa konflik semakin terbuka dengan munculnya perilaku-perilaku yang kontra produktif (saling bertentangan) diantara pelaku konflik. Pentahapan konflik dalam penelitian ini merujuk pada Fisher et al. (2000) yang membagi lima tahapan konflik yaitu prakonflik, konfrontasi, krisis, akibat dan pascakonflik. Berdasarkan pendapat di atas, analisa pentahapan konflik pada tulisan ini digambarkan dalam grafik eskalasi konflik pada Gambar 1.

Kondisi krisis ini akibat dari semakin mengentalnya pertentangan antara pesengketa dan semakin merenggangnya hubungan antar pihak yang terlibat dalam pemanfaatan sumber daya di perairan Bengkalis. Walaupun terjadi penurunan aktifitas yang konfrontatif, tetapi tidak menunjukkan gejala akan berakhir. Hal tersebut merupakan peredaman sementara yang dilakukan oleh pesengketa sendiri maupun oleh pihak lain.

Bentuk-bentuk konflik pemanfaatan sumberdaya perikanan yang terjadi di perairan Bengkalis antara lain:

1. Perkelahian di laut tahun 1983 antara nelayan rawai dengan nelayan jaring kurau.
2. Perusakan alat tangkap rawai oleh nelayan jaring batu tahun 1985, 1986 dan 1988.
3. Penangkapan kapal jaring batu tahun 1990, 1997, 1998 dan 1999.
4. Penangkapan kapal dan pembakaran jaring batu tahun 1999.
5. Tuntutan ganti rugi nelayan rawai tahun 2000.
6. Pembakaran kapal jaring batu tahun 1998, 2001 dan 2002.
7. Pemanahan dan aksi saling sandera tahun 2003.
8. Demonstrasi dan tuntutan nelayan rawai tahun 2004 dan 2005.



Gambar 1 Grafik penahapan terjadinya konflik antara nelayan rawai dengan nelayan jaring kurau berdasarkan Fisher *et al* 2000.

9. Pembakaran, penculikan dan penangkapan terhadap nelayan rawai, tahun 2006.
10. Aksi massa dan tuntutan nelayan yang tergabung dalam SNKB, tahun 2008.

Konflik antara nelayan rawai dengan nelayan jaring batu di perairan Kecamatan Bantan sudah berlangsung hampir tiga dasawarsa. Konflik berkepanjangan ini berawal ketika perburuan terhadap spesies ikan kurau di kawasan perairan Kecamatan Bantan mulai meningkat.

Perburuan terhadap ikan kurau (*Eleutheronema tetradactylum*) mulai intensif dilakukan pada tahun 1981 oleh nelayan kapal motor dengan menggunakan alat tangkap jaring batu. Masyarakat nelayan Kecamatan Bantan masih menggunakan sampan dayung dan alat tangkap rawai. Tercatat pada tahun yang sama tidak kurang dari 40 unit kapal jaring batu beroperasi di wilayah tangkap nelayan rawai di perairan Kecamatan Bantan. Maraknya perburuan ikan kurau menyebabkan banyak nelayan jaring batu masuk ke perairan Kecamatan Bantan untuk menguasai daerah tangkapan nelayan rawai. Masuknya alat tangkap ini membuat kenyamanan nelayan Kecamatan Bantan terganggu sehingga terjadi banyak pertikaian di laut sebagai bentuk penolakan nelayan rawai.

Pertikaian-pertikaian tersebut mulanya dipicu oleh pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan nelayan jaring batu terhadap nelayan rawai seperti kapal jaring batu menabrak nelayan rawai atau mengusir nelayan rawai supaya nelayan jaring batu bebas melakukan penangkapan. Selain pelanggaran yang menimbulkan kerugian langsung pada nelayan rawai, nelayan jaring batu juga dianggap telah melanggar nilai-nilai yang berlaku di wilayah tangkapan nelayan rawai.

Formulasi data lapangan terhadap latar belakang konflik ditampilkan dalam bentuk urutan kejadian untuk menunjukkan sejarah konflik berdasarkan tahun, bulan dan tanggal sesuai dengan skalanya. Urutan kejadian konflik nelayan rawai Kecamatan Bantan dengan jaring batu dari tahun 1970-an sampai tahun 2004 disajikan pada Tabel 1.

### Pemetaan Konflik

Fisher *et al.* (2000), menyatakan bahwa pemetaan konflik merupakan suatu cara untuk menggambarkan konflik secara grafis, menghubungkan pihak-pihak dengan masalah dan pihak lainnya. Pihak-pihak yang terlibat baik langsung maupun tidak langsung pada konflik ini divisualkan kedalam peta konflik yang disajikan pada Gambar 2.

Hubungan keterlibatan antara masing-masing pihak dinyatakan pula dalam peta konflik. Pihak yang berkonflik adalah nelayan rawai yang berasal dari Kecamatan Bantan yaitu antara nelayan rawai dan nelayan jaring batu yang dimodali tauke (pengusaha) yang berasal dari dalam dan luar Propinsi Riau.

Situasi yang tidak harmonis antara pihak yang berkonflik (Gambar 2) karena adanya perbedaan nilai dan cara pandang terhadap sumberdaya perikanan, sehingga masing-masing pesengketa memiliki metode yang berbeda dalam pemanfaatan sumber daya perikanan. Sejalan dengan itu, terdapat perbedaan kepentingan yang bertolak belakang antara kedua belah pihak, termasuk tingkat ketergantungan terhadap sumber daya perikanan. Pemerintah sebagai pembuat kebijakan dalam regulasi sektor perikanan akan sangat berperan dalam situasi ini.

Tabel 1 Urutan kejadian konflik nelayan rawai dengan jaring batu

WAKTU	BENTUK KONFLIK	SKALA DAN INTENSITAS	LOKASI
1970 s/d 1979	Nelayan rawai menangkap ikan kurau dengan rawai menggunakan sampan dayung	-	-
1981	Pemburuan terhadap ikan kurau melalui intensif dilakukan oleh jaring batu/kurau yang menggunakan kapal motor.	-	-
1983	Perkelahian nelayan jaring batu dengan nelayan rawai di laut.	Jaring batu menabrak rawai Nelayan rawai mendapat intimidasi aparat yang membeking pemodal jaring batu Karena ketakutan masyarakat melarikan diri ke Malaysia	Teluk Pambang
1984	Nelayan jaring batu leluasa beroperasi di perairan Bantan tanpa ada perlawanan dari nelayan rawai	-	-
1985	Dinas Perikanan melakukan penangkapan satu unit kapal motor jaring batu	Jaring batu beroperasi di wilayah 0-3 mil dan menabrak rawai.	Teluk Pambang
1986	Penangkapan satu unit jaring batu oleh nelayan rawai dan dibawa ke pantai Desa Teluk Pambang	Jaring batu menabrak rawai	Teluk Pambang
1987	Bentrokan nelayan rawai dengan nelayan jaring batu	Nelayan jaring batu menabrak rawai	Teluk Pambang
1988	Bentrokan di laut	Nelayan jaring batu menabrak rawai	Teluk Pambang
1988	Bentrokan di laut	Nelayan jaring batu menabrak dan merusak rawai, nelayan rawai membalas dengan memotong pelampung jaring batu	Teluk Pambang
1990	Terjadi bentrokan	Nelayan jaring batu menabrak rawai	Teluk Pambang
1991	Terjadi penangkapan jaring batu	Beroperasi di kawasan tangkap nelayan rawai	Teluk Pambang
1993	Bentrok terjadi di laut	Jaring batu menabrak dan merusak rawai Tindakan tersebut dibalas oleh nelayan rawai dengan mengiris tali jaring batu dan ditinggal lari	Teluk Pambang
1994		Melayan jaring batu menabrak rawai	Teluk Pambang
1995	Dinas Perikanan Bengkalis, Camat Bantan, Kades Desa Teluk Pambang melakukan patroli	Tiga unit kapal jaring batu ditangkap karena melanggar perjanjian yang telah dibuat sebelumnya	Teluk Pambang
1996	Bentrok diperaian laut	Jaring batu menabrak rawai	Teluk Pambang
1997	Nelayan rawai melakukan ronda laut	Mengangkap dua unit kapal jaring batu	Teluk Pambang
7 Juli 1998	Masyarakat menangkap jaring batu lalu di bawa ke pantai	Tiga unit jaring batu dibakar di pantai	Teluk Pambang

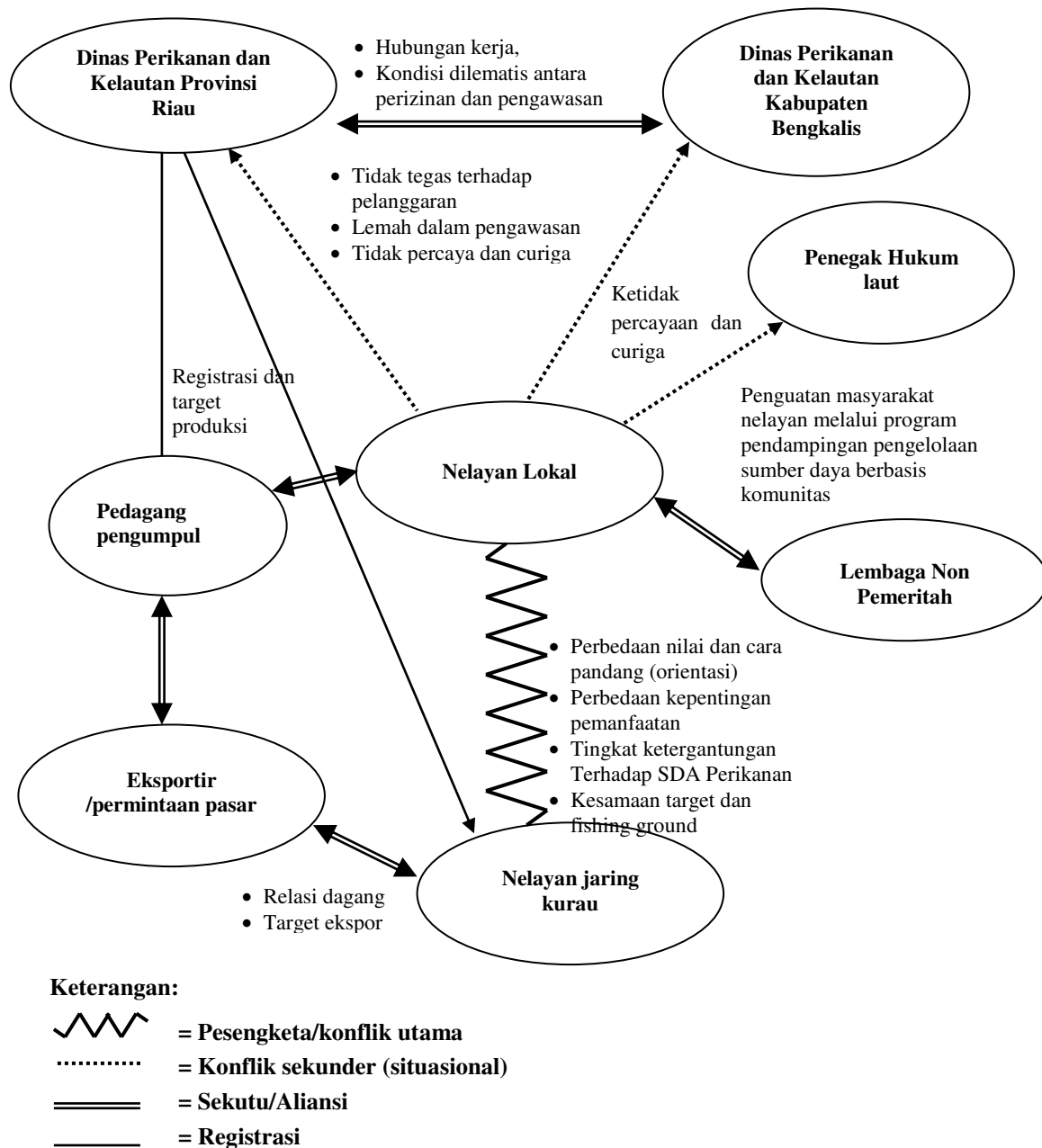
8 Juli 1999	Masyarakat Desa Teluk Pambang mengadakan penangkapan kapal jaring batu yang beroperasi di perairan Teluk Pambang	Tiga unit kapal jaring batu di bawa ke pantai	Teluk Pambang
20 Juli 1999	Terjadi penangkapan kapal jaring batu di antara Perairan Bantan Air dan Muntai	Jaring dibakar dan kapal ditarik kepantai	Bantan Air
29 Jan 2000	Masyarakat Desa Teluk Pambang melakukan penangkapan kapal jaring batu	Dua kapal jaring batu tertangkap dan dibawa ke pantai	Teluk Pambang
12 Feb 2000	Masyarakat Desa Selat Baru melakukan penangkapan	Satu kapal jaring batu di tahan masyarakat	Selat Baru
18 Mai 2000	Nelayan Desa Selat Baru dan Desa Teluk Pambang yang tergabung dalam SNKB (Serikat Nelayan Kabupaten Bengkalis) melakukan penangkapan	Lima unit kapal jaring batu tertangkap	Teluk Pambang
9 Sep 2000	Nelayan yang tergabung dalam SNKB melakukan penangkapan kembali	Dua unit kapal jaring batu ditahan oleh SNKB (Serikat Nelayan Kabupaten Bengkalis)	Jangkang
25 Feb 2001	SNKB melakukan penangkapan kapal jaring batu di perairan Teluk Pambang	Satu unit jaring batu ditahan	Teluk Pambang
1 Juni 2001	SNKB melakukan penangkapan jaring batu di perairan Teluk Pambang.	Tiga unit kapal jaring batu yang berasal dari Kec. Merbau berhasil ditangkap. Satu unit dibakar ditengah laut. Dan dua unit lainnya di bawa kepantai.	Teluk Pambang
29 Apr 2002	Pembakaran kapal jaring batu yang melakukan penangkapan ikan di Perairan Jangkang di bawah 4 mil laut	2 unit kapal jaring batu dibakar oleh masyarakat jangkang	Jangkang
20 Okt 2002	SNKB kembali menangkap kapal jaring batu di perairan Teluk Pambang	Satu unit kapal jaring batu tertangkap dan dibawa ke pantai.	Teluk Pambang
6 Jan 2003	Nelayan jaring batu melakukan penyerangan kepada nelayan rawai	Nelayan rawai mengalami luka dibagian kepala dengan 17 jahitan karena dipukul dengan besi oleh nelayan jaring batu	Teluk Pambang
1 Mar 2003	Nelayan jaring batu melakukan penyanderaan ponpong nelayan rawai	Satu unit pompong nelayan rawai disandera oleh nelayan jaring batu	Teluk Pambang
16 Juni 2003	Perang terbuka antara nelayan rawai dengan nelayan jaring batu	Satu orang nelayan rawai cedera terkena panah nelayan jaring batu Tiga Orang nelayan rawai disandra nelayan jaring batu Enam orang nelayan jaring batu disandera oleh nelayan rawai Satu unit pompong nelayan rawai di sandera nelayan jaring batu, dan 1 unit kapal jaring batu disandera oleh nelayan rawai	Teluk Pambang
3 Juli 2003	Penyanderaan nelayan Desa Kembung Luar oleh nelayan jaring batu	Dua orang nelayan kembung luar beserta 1 unit pompong disandera oleh nelayan jaring batu	Teluk Pambang

Akhir 2003	Terjadi penangkapan kapal jaring batu di antara perairan Desa Jangkang dan Selat Baru	Dua unit di bakar	Selat Baru
8 Jan 2004	Penangkapan jaring batu oleh masyarakat Selat Baru	Dua unit kapal jaring batu ditahan masyarakat	Selat Baru
Peb 2004	Penyanderaan warga Teluk Pambang oleh nelayan jaring batu	Satu orang warga yang pulang berdagang dari malaysia disandera selama 2 hari	Rangsang
Juli 2004	Penangkapan jaring batu yang beroperasi dibawah 4 mil oleh SNKB (dimotori oleh masyarakat Selat Baru) bersama Aparat Kepolisian Bengkalis dan Sekcam Bantan	Satu Unit jaring batu diamankan aparat, 1 orang nelayan jaring batu (jang karim) di proses serta 1 orang nelayan Selat Baru di tahan (tuduhan penganiayaan) Kejadian ini berbuntut Aksi demo Nelayan Rawai ke DPRD Bengkalis.	Selat Baru
8 Agt 2004	Penangkapan jaring batu oleh SNKB	Satu unit jaring batu ditahan dan ABK kapal jaring batu dianiaya nelayan Rawai. (dari keterangan SNKB, masyarakat melampiaskan emosinya karena penangkapan Jang Karim yang dianggap gembong jaring batu pada beberapa hari sebelumnya tidak mendapat sanksi apa-apa dari kepolisian)	Teluk Pambang
Okt 2005	-	DPRD Riau menyurati Danlanal, Guskamlabar dan KASAL, untuk membantu penyelesaian masalah yang melibatkan kesatuan	Pekanbaru
2006	-	Dikeluarkannya SK Gubernur Riau No 17 tahun 2006, tentang pelarangan pengoperasian jaring batu di Perairan Bengkalis hingga 12 mil laut	Pekanbaru
15-16 Juni 2006	Nelayan jaring batu membakar 1 buah pompong rawai	- Sepuluh orang nelayan rawai terluka - Polisi menangkap beberapa orang nelayan rawai yang dituduh membunuh nelayan jaring batu	Teluk Pambang dan Ransang Barat
16 Nov 2006	Terjadi penculikan di laut oleh nelayan jaring batu	Empat orang nelayan rawai hilang di perairan Selat Malaka dan belum kembali hingga saat ini	Teluk Pambang
2 April 2008	Nelayan yang tergabung dalam SNKB (1500 orang) melakukan aksi massa ke Kantor Bupati Bengkalis	Mendesak Pemkab Bengkalis dan Pemprov Riau untuk membuat Perda dengan segera atas SK Gubernur No 17 tahun 2006	Kabupaten Bengkalis
April 2008	-	Dibentuknya mediasi dalam penyelesaian konflik antara nelayan rawai dengan jaring batu	Teluk Pambang

Sumber: diolah dari data primer (wawancara) dan data sekunder (Yayasan Laksana Samudera; Cofish Project, Harian Pagi Riau Pos, Mingguan SEBATI, Edisi 16/Tahun I/ 3-9 Juli 2003, WALHI Riau dan berbagai sumber).

Kecurigaan nelayan rawai muncul akibat sikap yang tidak tegas aparat dalam menangani kasus-kasus yang terjadi, seperti melepaskan nelayan jaring batu yang tertangkap tanpa ada proses yang jelas. Sering kali kapal jaring batu yang ditangkap tidak dilengkapi IUP (izin usaha perikanan) atau SPI (surat penangkapan ikan) ganda. Charles (2001) menyatakan bahwa konflik

merupakan gangguan sosial karena nelayan merasa tidak aman dalam melakukan kegiatan usahanya. Berdasarkan informasi dari nelayan, konflik antar nelayan juga terjadi akibat ketidakjelasan kebijakan yang telah dibuat oleh instansi terkait. Status dan frekuensi konflik perlu ditangani dengan cara implementasi hukum maupun ketegasan aparat terhadap pelanggaran



Gambar 2 Peta konflik nelayan di Perairan Bengkalis pada saat krisis

yang terjadi dengan melibatkan partisipasi masyarakat lokal. Hal ini sesuai dengan paradigma pengelolaan sumber daya perikanan berkelanjutan yaitu konservasi, rasional dan komunitas nelayan.

### Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Konflik

Faktor mendasar pendorong terjadinya konflik belum banyak mendapat perhatian dan dijadikan dasar dalam penyelesaiannya. Faktor tersebut diidentifikasi menjadi tiga bagian: 1) dilatarbelakangi kultur nelayan rawai Kecamatan Bantan dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya perikanan yang tidak menda-

pat pengakuan dari nelayan jaring batu; 2) faktor sosial yang cenderung melakukan perebutan wilayah tangkap, dimana kehadiran nelayan jaring batu telah dianggap mengganggu ketertarikan dan kenyamanan nelayan rawai; dan 3) faktor yuridis yaitu keberadaan peraturan dan perundangan yang mengatur pemanfaatan sumber daya perikanan yang tidak sesuai dengan karakteristik daerah dan sistem nilai yang berlaku di masyarakat nelayan Kecamatan Bantan.

Perbedaan cara pandang terhadap sumberdaya perikanan oleh nelayan rawai Kecamatan Bantan dan pengusaha jaring batu disajikan pada Gambar 3. Konflik pemanfaatan tim-

bul karena beberapa pengguna berkompetisi menggunakan sumber daya yang sama dalam ruang laut yang sama dan menerapkan kegiatan-kegiatan yang memanfaatkan sumber daya tidak sesuai antara satu dengan yang lain (Dahuri *et al.*, 1996). Intensitas konflik akan ditentukan oleh tingkat perbedaan teknologi penangkapan yang digunakan nelayan, keterbatasan teritorial distribusi spesies yang akan ditangkap dan jumlah nelayan yang memperebutkannya (Kusnadi, 2002).

Wujud konflik antar nelayan juga ditimbulkan oleh adanya perbedaan nilai, kepentingan dan konflik di kalangan mereka yang berada dalam posisi yang sama. Misalnya konflik antara alat tangkap rawai dan jaring batu, rawai menggunakan teknologi yang sederhana serta kebutuhan modal yang rendah dan nelayan yang mengoperasikan rawai relatif lebih dominan sedangkan jaring batu menggunakan teknologi yang lebih tinggi dan membutuhkan modal yang lebih besar. Konsekuensinya, kedua alat tangkap ini digunakan oleh nelayan dengan tingkat sosial yang berbeda. Hal inilah yang diduga sebagai awal mula terjadinya konflik.

Faktor sosial lainnya yang ikut mendorong konflik antara nelayan rawai dan jaring batu yaitu adanya persaingan antara kedua kelompok nelayan untuk memperoleh objek yang sama di wilayah tangkap yang sama pula. Perbedaan bentuk dan sifat alat tangkap membuat kedua alat tangkap memiliki laju tangkap yang berbeda pula. Jaring batu dengan konstruksi yang mampu menyapu area tangkap yang lebih luas, memiliki laju tangkap yang lebih tinggi dibanding rawai, sehingga jaring batu akan mendapatkan hasil yang lebih banyak dibanding rawai.

Kemampuan alat tangkap yang rendah dan semakin banyaknya nelayan jaring batu yang beroperasi mengakibatkan semakin kecilnya peluang nelayan rawai dalam mendapatkan spesies target yaitu ikan kurau. Semakin kecilnya peluang untuk mendapatkan ikan akan berakibat semakin kecil pula pendapatan yang mereka dapatkan. Kondisi tersebut tentu saja mendesak perekonomian rumah tangga sehingga memicu kemarahan nelayan rawai kepada nelayan jaring batu.

Wujud konflik antar nelayan juga ditimbulkan karena perbedaan nilai, kepentingan dan konflik di kalangan mereka yang berada dalam posisi yang sama. Wilayah penangkapan nelayan di Kecamatan Bantan bukanlah perairan laut yang luas, dalam arti disemua wilayah laut dapat melakukan aktifitas penangkapan. Karakteristik geografis dasar perairan yang landai menyebabkan ruang tang-

kap ikan menjadi sempit. Keterbatasan ruang tangkap ini memaksa para nelayan berada pada ruang yang sama sehingga terjadi tumpang tindih atau penumpukan alat tangkap yang akan memicu konflik.

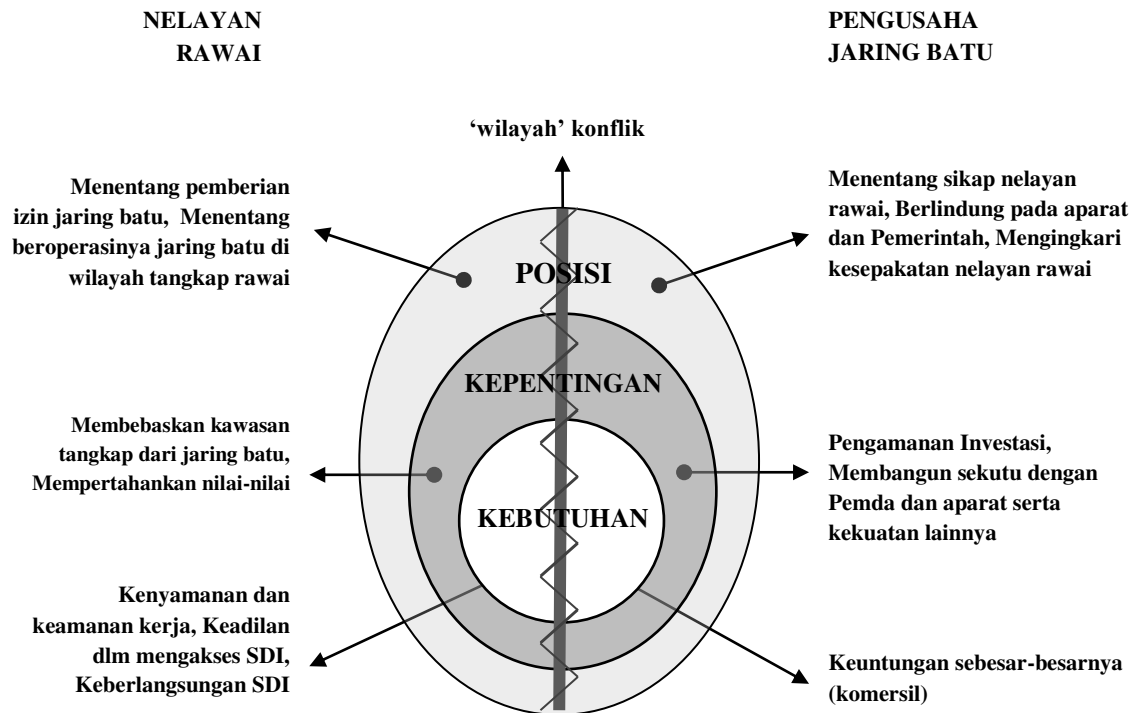
Dampak yang ditimbulkan karena persengketaan antara nelayan rawai dengan jaring batu telah memicu hubungan yang tidak harmonis antara nelayan rawai dengan pihak-pihak lain, seperti dinas perikanan (kabupaten dan provinsi), aparat kepolisian dan Angkatan Laut (konflik sekunder). Konflik sekunder ini terjadi akibat ketidakpuasan nelayan rawai terhadap sikap dinas perikanan dan aparat sebagai pihak yang berwenang dianggap tidak sungguh-sungguh dalam penyelesaian kasus dan selalu berpihak pada nelayan jaring batu, sehingga menimbulkan kecurigaan.

Konsepsi yang berlanjut pada eksploitasi sumber daya perikanan oleh nelayan jaring batu telah melanggar tatanan sosial yang berlaku di wilayah penangkapan nelayan rawai. Nelayan rawai menganggap jaring batu merupakan alat tangkap yang berpotensi mengancam kelestarian sumber daya perikanan. Anggapan negatif ini terbukti ketika jaring batu bebas beroperasi, dapat dipastikan nelayan perairan Bengkalis khususnya nelayan rawai tidak mendapatkan ikan selama beberapa hari. Nelayan jaring batu merupakan nelayan buruh yang dimodali oleh para pengusaha perikanan tangkap berorientasi pada jumlah hasil tangkapan yang mengacu pada prinsip-prinsip ekonomi yang mengandalkan teknologi. Prinsip mereka adalah menggunakan teknologi penangkapan yang lebih modern untuk mendapatkan hasil tangkapan sebanyak-banyaknya.

Perbedaan ideologi dan prinsip terjadi dalam pemanfaatan sumber daya perikanan antara nelayan rawai Kecamatan Bantan dengan nelayan jaring batu yang datang dari luar. Keduanya mengartikulasikan dan memperlakukan sumber daya perikanan secara berbeda. Nelayan rawai menerapkan pemanfaatan sumber daya perikanan berbasis lokal yang bersifat konservasi sedangkan nelayan jaring batu mengaktualisasikan kepentingannya berdasarkan aspek ekonomi dan modal yang bersifat eksploitatif. Dikotomi dan polarisasi semacam inilah yang menggambarkan tajamnya persoalan etnosentrisme yang kental mengiringi modernisasi (Hettne, 2001), sehingga berpotensi terjadi konflik.

Konflik yang terjadi di perairan Bengkalis dapat diselesaikan dengan beberapa cara, diantaranya: 1) melakukan mekanisme pengaturan yang sistematis terhadap pemanfaatan sumberdaya ikan; 2) meningkatkan pengawasan





Gambar 3 Analogi “Bawang Bombay” konflik nelayan rawai Kecamatan Bantan dengan nelayan jaring batu.

terhadap pemanfaatan sumber daya ikan dari alat tangkap yang dapat menimbulkan konflik dan dapat memberikan jaminan keamanan dalam melakukan usaha penangkapan, sehingga dapat meningkatkan pendapatan nelayan; 3) mengakui secara formal hak ulayat yang berlaku dimasyarakat nelayan dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya perikanan tangkap.

## KESIMPULAN

### Kesimpulan

Konflik yang terjadi di perairan Kabupaten Bengkalis dikarenakan perburuan terhadap ikan kurau meningkat. Wujud konflik antar nelayan juga ditimbulkan oleh adanya perbedaan nilai, kepentingan dan konflik dikalangan mereka yang berada dalam posisi yang sama. Modernisasi pada sektor perikanan tangkap telah terbukti memperbesar arus eksploitasi yang berujung pada kerusakan ekosistem laut dan *over fishing* serta kerawanan sosial antar nelayan akibat persaingan dalam pemanfaatan sumber daya perikanan. Penambahan jumlah nelayan dan alat tangkap yang beroperasi tidak sesuai dengan ketersediaan sumber daya perikanan. Berbedanya tingkat teknologi dan pemodalannya yang digunakan antar alat tangkap, misalnya alat tangkap rawai dengan teknologi

yang sederhana serta kebutuhan modal yang rendah dan nelayan yang mengoperasikan rawai relatif lebih dominan. Adapun jaring batu menggunakan teknologi yang lebih maju dan membutuhkan modal yang lebih besar. Sebagai konsekuensinya, kedua alat tangkap ini digunakan oleh nelayan dengan tingkat sosial yang berbeda. Hal inilah yang diduga sebagai awal mula terjadinya konflik.

### Saran

Penyelesaian konflik di perairan Kabupaten Bengkalis dapat dilakukan dengan membuat kebijakan pemerintah yang tegas untuk mengatur penggunaan alat tangkap dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya perikanan yang memperhatikan kondisi wilayah dan sosial budaya masyarakat setempat. Perlu juga dikembangkan sistem pengawasan masyarakat yang didukung oleh aturan legal untuk mencegah agar tidak terjadi pelanggaran.

Celah yang ada untuk merealisasikan gagasan penyelesaian ini adalah mengusulkan Peraturan Daerah untuk mengatur dan menata pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya perikanan yang sinergi antara kebijakan pemerintah Kabupaten Bengkalis dan Propinsi Riau serta memasukkan nilai-nilai yang berkembang di tengah masyarakat ke dalam Peraturan Daerah.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Dahuri, R., Rais, J., Ginting, S.P., dan Sitepu. M.J. 1996. Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Lautan Secara Terpadu (Integrated Coastal and Marine Resource Management). PT. Paradnya Paramita, Jakarta.
- Charles AT, 2001. Sustainable Fisheries System. *Fish and Aquatic resources series. Blackwell Science*. Osney Mead, OXFORD OX2 OEL, UK. 370p
- Fisher S., Jawed L., Steve W., Dekha I. A., Richard S. dan Sue W. 2001. Mengelola Konflik, Ketrampilan dan Strategi untuk Bertindak. The British Council Indonesia. Jakarta.
- Hettne, B. 2001. Pembangunan Dunia Ketiga. (ed) A. Puspo Kuntjoro, Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Kusnadi. 2002. Konflik Sosial Nelayan, Kemiskinan dan Perebutan Sumber daya Perikanan. LKIS. Yogyakarta.